



## Joko Fokus Pelajari Defisit APBD Kalbar

**PONTIANAK, SP** – Polemik soal potensi defisit anggaran APBD Provinsi Kalbar yang disebutkan mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, hingga kini belum menemukan titik terang. Jika memang nanti terbukti, defisit ini tentu menjadi tanda tanya bagi banyak pihak.

Terkait persoalan ini, juga turut menjadi perhatian Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar yang baru saja

dilantik, Joko Agus Setyono yang menggantikan Ida Sundari.

Meski belum mau berkomentar banyak ihwal ini, dia menyatakan akan fokus mempelajari persoalan defisit APBD Kalbar tersebut.

“Saya baru masuk ke sini belum bisa ditanya masalah itu. Belum bisa berkomentar. Nanti kalau sudah berjalan akan saya pelajari kenapa defisit APBD-nya,” kata mantan Kepala BPK RI Per-

• Baca Halaman 15



SUARA PEMRED/NANA ARIANTO

**SERTIJAB** – Suasana serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar yang lama, Ida Sundari kepada pejabat baru Joko Agus Setyono, kemarin. Joko menyatakan akan mempelajari soal defisit anggaran APBD Kalbar.

### Hal 9 ■ joko fokus

wakilan Riau, kemarin.

Joko Agus menyebutkan, sebenarnya berkaitan dengan APBD ini pasti sudah dilakukan pemeriksaan pada semester sebelumnya. Sehingga BPK juga sudah tahu berapa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tersebut.

“Ttu kan sebenarnya begini, ada pemeriksaan kita semester lalu, tahun lalu kita tahu Silpa-nya berapa. Misalnya saja pembahasan untuk penggunaan untuk tahun ini, yang jelas defisit itu belanjanya lebih besar dari pada pendapatannya, begitu loh,” tandasnya.

Sementara itu, mantan Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Ida Sundari menyebutkan tidak ada defisit anggaran yang terjadi pada APBD Kalbar.

“Kalau secara keseluruhan di Kalbar tidak terjadi defisit karena anggarannya itu memang sudah sesuai dengan

yang diusulkan,” ujar Ida.

Meski begitu, Ida menyebutkan bahwa memang ada beberapa penghematan yang kemudian berdampak pada pengurangan anggaran yang berasal dari APBN.

“Memang ada beberapa penghematan, jadi ada yang pengurangan anggaran justru dari APBN itu sendiri dikurangi, jadi sebenarnya bukan defisit,” katanya.

Pemotongan anggaran ini menurutnya tidak hanya terjadi di daerah saja. Tapi juga di pusat, sehingga pada akhirnya dari anggaran yang direncanakan itu tidak sesuai harapan karena dilakukan pemotongan tadi.

“Anggaran yang direncanakan itu sudah diberikan tetapi pada saat pelaksanaan di tengah jalan itu ada pemotongan anggaran. Itu tidak hanya di daerah saja sebenarnya, di pusat juga dipotong juga, “

imbuhnya.

Dia memastikan, hingga sejauh ini pihaknya tidak ada temuan terkait dengan persoalan defisit anggaran APBD Kalbar yang muncul ke publik pasca beredarnya Surat Gubernur Kalbar Nomor 903/2115/TAPD.

Surat itu berisikan potensi defisit anggaran pada APBD TA 2018 sejumlah Rp600 miliar lebih lantaran sejumlah target pendapatan dan belanja daerah tidak terealisasi atau kurang penganggaran.

“Jadi ada beberapa kegiatan mungkin yang memang tidak dapat dilaksanakan karena ada pemotongan anggaran itu,” kata Ida.

“Di anggaran memang tidak ada, karena memang kebijakan dari pemerintah. Untuk temuan dari BPK juga tidak ada terkait dengan itu,” tegasnya. **(nak/and)**